



# Bonus Demografi di Indonesia

## Kesiapan Kaum Muda & Pemerintah Menghadapi Bonus Demografi

No: IPP/2019/05-I



The Atma Jaya Institute for Public Policy (AJIPP) was initially launched in 2017. The institute strives to provide quintessential contributions to various discourses on public policies through outstanding research and publication, comprehensive evaluation and thorough discussion and consultation with experts, practitioners and stakeholders. The author(s) welcome comments of the paper.

© 2019 Atma Jaya Institute of Public Policy, Jakarta

## Bonus Demografi di Indonesia

### Kesiapan Kaum Muda dan Pemerintah Menghadapi Bonus Demografi

*"Bonus demografi sudah mulai dari 2015 di Indonesia (menurut BPS). Puncaknya ada di tahun 2035. Hal ini bisa menjadi window of demographic disaster (meroketnya angka kriminal), atau menjadi window of opportunity (ketika mau investasi yang banyak pada sumber daya manusia). Hasilnya tidak bisa langsung dirasakan. Yang berhasil contohnya RRC dan Korea. Kuncinya adalah pemberdayaan perempuan, pemberdayaan pemuda, dan penghapusan pekerja anak,"*

Dedek 'Uki' Prayudi, politisi PSI.

*Brownbag Discussion:* Politisi Milenial Menjawab Tantangan Bonus Demografi  
22 Maret 2019

#### Ringkasan Eksekutif

1. Kaum muda urban memiliki sifat kritis, terbuka, dan rasional. Mereka mampu memahami dirinya sendiri, termasuk kemampuan dan apa yang penting bagi mereka. Namun, sebagian besar belum memahami posisi sosial dan kekuatan mereka saat ini.
2. Terdapat transisi tren saat ini dari bisnis konvensional menjadi modern berbasis teknologi yang jauh lebih diminati oleh kaum muda.
3. Calon pemimpin yang bersaing dalam pemilu 2019 memiliki pendekatan yang berbeda dalam menyikapi bonus demografi, meskipun tujuan akhirnya sama yaitu: memetik keuntungan sebesar-besarnya dari fenomena tersebut.

# Bonus Demografi di Indonesia

## Kesiapan Kaum Muda dan Pemerintah Menghadapi Bonus Demografi

### Pendahuluan

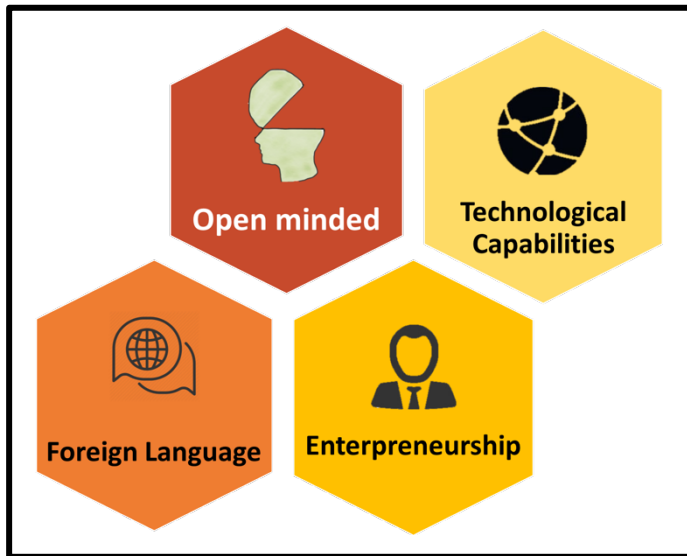
Berdasarkan proyeksi yang dikeluarkan oleh Biro Pusat Statistik (BPS), Indonesia akan mengalami periode bonus demografi pada kurun waktu 2020 hingga 2035, dengan 64% populasi Indonesia adalah angkatan kerja. (BPS, 2012). Keadaan ini dapat menguntungkan dan meningkatkan perekonomian negara apabila ditangani dengan tepat. Namun sebaliknya, respon yang tidak maksimal terhadap bonus demografi berpotensi mengganggu stabilitas sosio-politik, keamanan, dan ekonomi.

Saat ini kaum muda mencakup kurang lebih 40% dari populasi Indonesia, sehingga masa depan Indonesia ditentukan oleh kualitas mereka saat ini (BPS, 2012). Selain itu, urbanisasi diperkirakan akan mencapai 66,6% pada tahun 2035 yang berarti lebih dari setengah populasi Indonesia akan hidup di daerah perkotaan (Bappenas et al., 2013). Hal tersebut menandakan pentingnya peran kaum muda di perkotaan dalam menghadapi bonus demografi. Fakta dan prediksi tersebut menimbulkan sebuah pertanyaan penting: Bagaimana pandangan kaum milenial urban Indonesia sebagai pihak yang terlibat dalam bonus demografi untuk menghadapi hal tersebut?

Lebih lanjut, pemerintah dituntut untuk mengambil peran penting dalam menghadapi bonus demografi. Apa saja kebijakan yang mendesak untuk diambil oleh pemerintah yang akan terpilih pasca-pemilu 2019? Apa saja program dan agenda yang akan ditawarkan oleh partai politik dan calon legislatif, khususnya mereka yang tergolong "politisi milenial" untuk mengantisipasi bonus demografi tersebut?

### Bagaimana Pemuda Indonesia Memandang Bonus Demografi?

Bonus demografi bukanlah istilah yang membumi bagi kaum muda perkotaan. Mayoritas dari mereka mungkin belum memahami istilah ini. Hal tersebut ditunjukkan melalui survei yang dilakukan Atma Jaya Institute of Public Policy (AJIPP) di awal tahun 2019. Survei tersebut memanfaatkan *platform* daring dengan target kaum milenial urban di tiga kota besar yaitu Jabodetabek, Bandung, dan Surabaya. Persebaran demografi dari partisipan didominasi kaum milenial perempuan (57%) dengan latar belakang Pendidikan SMA sederajat (56%) dan tinggal di Jabodetabek (56%). Survei tersebut menemukan fakta bahwa 53% persen responden mengaku tidak pernah mendengar istilah bonus demografi, 14% ragu-ragu, dan hanya 33% yang mengetahui istilah tersebut.



**Gambar 1.** Empat area yang dianggap penting dalam menghadapi bonus demografi menurut kaum milenial urban tahun 2019

Lebih lanjut, survei yang sama menemukan adanya optimisme yang besar dari kaum muda perkotaan. Sebanyak 63% responden menyatakan bahwa mereka yakin dapat berkompetisi secara global. Hanya sekelompok kecil yakni 4% responden yang memandang pesimis prospek bersaing dengan negara lain. Meskipun demikian, dalam menghadapi tantangan, kaum muda perkotaan sangat menghargai keterbukaan pikiran yang menunjukkan bahwa mereka memiliki sifat kritis, rasional, dan terbuka.

Pada dasarnya kaum milenial urban mampu memahami dirinya, termasuk kemampuan dan apa yang penting bagi mereka. Namun, sebagian besar belum memahami posisi sosial dan kekuatan mereka saat ini. Hal ini ditunjukkan dengan kesiapan untuk bersaing secara global yang belum maksimal. Dalam konteks ini, peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk menyediakan atmosfer yang ramah terhadap anak muda untuk berkarya dan berprestasi. Hal ini juga diutarakan dalam diskusi mengenai tantangan bonus demografi yang kami selenggarakan di bulan Maret 2019 dengan mengundang politisi dan pengamat politik muda sebagai narasumber. Andina Dwifatma, dosen Ilmu Komunikasi Unika Atma Jaya mengatakan, *“Jika ingin merangkul milenial, berikan regulasi yang mendukung milenial”*.

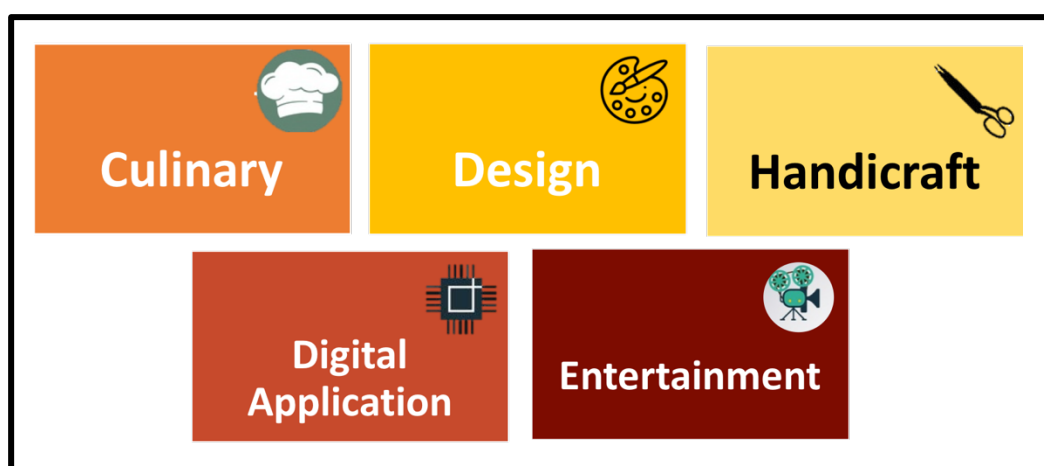
***“Jika ingin merangkul milenial, berikan regulasi yang mendukung milenial”***

Beberapa hal yang menjadi pekerjaan rumah untuk menghadapi bonus demografi memang membutuhkan dukungan pemerintah, seperti masih tingginya angka pengangguran dan persentase tenaga kerja murah dibanding tenaga ahli. Berbagai program yang sedang atau akan dilaksanakan juga perlu memperhatikan kondisi fundamental perekonomian Indonesia. “Bagaimana cara menarik sektor informal menjadi formal agar jaminan sosial bisa lebih mengakomodasi tenaga kerja? Lalu mengenai keperluan riset dan inovasi untuk menciptakan lapangan kerja baru, apa insentif yang akan diberikan ke perusahaan yang melakukan itu? Hal-hal ini yang perlu kita minta programnya ke partai politik dan calon penguasa,” papar Edbert Gani Suryahudaya, Direktur AJIPP.

## Bagaimana Upaya Pemuda Indonesia Menghadapi Tantangan Global dan Bonus Demografi?

Dalam upaya mengembangkan diri dan menghadapi tantangan global serta bonus demografi, terdapat beberapa hal yang diunggulkan oleh kaum muda perkotaan (lihat Gambar 1). Dua poin yang tersebut adalah kemampuan menggunakan teknologi dan *entrepreneurship*. Preferensi ini sejalan dengan tren munculnya banyak *start-up* akhir-akhir ini.

Sebanyak 33% kaum muda urban tertarik untuk memiliki *start-up* sendiri. Dari sekian banyak bidang dalam *start-up*, bidang makanan dan minuman menjadi yang paling diminati (lihat Gambar 2).



Gambar 2.  
Lima bidang *start-up* yang paling diminati kaum milenial urban tahun 2019

Adanya perubahan dari bisnis konvensional menjadi bisnis modern berbasis teknologi juga menuntut pemerintah untuk segera beradaptasi. Saat ini sangat dibutuhkan regulasi mengenai bisnis berbasis teknologi yang melindungi usaha-usaha muda dengan tidak menghalangi inovasi dan proses berkarya, serta kebebasan untuk menyatakan pendapat.

## Bagaimana calon pemerintah terpilih menghadapi tantangan bonus demografi?

Masing-masing calon presiden dan wakil presiden dalam pemilu 2019 memiliki visi dan misinya dalam menghadapi tantangan bonus demografi. Topik ini dibahas dalam acara *brownbag discussion* Maret 2019 yang kami selenggarakan dengan mengundang beberapa politisi milenial dari berbagai partai yang mewakili masing-masing koalisi pendukung calon presiden sebagai narasumber.

Dedek Prayudi sebagai calon legislatif dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengatakan fokus utama koalisi pendukung pasangan Jokowi-Ma'aruf untuk menghadapi bonus demografi adalah pemberdayaan perempuan, pemberdayaan pemuda, dan penghapusan pekerja anak yang terangkum dalam program: (1) Mekaar; (2) *Child care* masif; (3) Revitalisasi dan ekspansi SMK; (4) Kartu Indonesia Pintar; dan (5) Kartu Pra-kerja.

Mekaar dan *child care* masif lahir dari tingginya tingkat perempuan usia produktif yang tidak bekerja (45%). *Child care* ditargetkan untuk membantu perempuan yang memilih bekerja di

luar rumah, sedangkan Mekaar menyasar perempuan yang memutuskan untuk tetap tinggal di rumah dengan memberikan kredit lunak serta pelatihan kerja untuk mendirikan industri rumahan. Revitalisasi SMK dan kartu pra-kerja lahir dari banyaknya tenaga kerja Indonesia yang bekerja tidak sesuai dengan keahlian yang dimiliki, bertujuan untuk menyesuaikan pengetahuan dan kemampuan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan industri dan potensi lokal daerah masing-masing. Perbedaannya terletak pada jenjang pendidikan, dengan kartu pra-kerja menargetkan lulusan SMA dan sarjana yang belum mendapat pekerjaan.

Puteri Komarudin dari Partai Golongan Karya yang ikut tergabung dalam koalisi yang sama dengan Dedek Prayudi menambahkan pentingnya perhatian kepada daerah rural. Puteri menggarisbawahi ketimpangan antara Jakarta dan daerah sekitarnya. Melihat pergerakan masyarakat, memang dapat diperkirakan jumlah penduduk produktif urban akan mendominasi, tetapi daerah rural juga penting dalam menggerakkan perekonomian Indonesia. Banyak program daerah yang sebenarnya sudah baik, tetapi masih bisa ditingkatkan hingga mencapai potensi maksimal.

**“Yang penting adalah kolaborasi muda dan tua”  
Puteri Komaruddin**

Faldo Maldini dari Partai Amanat Nasional dan Khobbab Heryawan dari Partai Keadilan Sejahtera kemudian membahas berbagai upaya koalisi partai mereka dalam menghadapi bonus demografi. Khobbab menitikberatkan pentingnya tenaga ahli dan manusia inovatif yang dapat menciptakan peluang sendiri tanpa mengandalkan peluang dari pasar. Di sisi lain, Faldo Maldini justru menyuarakan pentingnya Indonesia menjadi negara industri dalam menghadapi bonus demografi dengan fondasi pengetahuan. Program yang ditonjolkan Faldo adalah Rumah Siap Kerja sebagai wadah pembekalan bagi pemuda usia produktif yang belum bekerja. Perusahaan yang memanfaatkan sumber daya dari Rumah Siap Kerja akan diberikan insentif.

Keempat politisi milenial tetapi kemudian sepakat bahwa calon pemerintah yang bersaing di pemilu 2019 memiliki visi dan misinya masing-masing dalam menghadapi bonus demografi. Meskipun demikian, tujuan akhirnya adalah sama yaitu memajukan Indonesia dengan memetik keuntungan sebesar-besarnya dari fenomena tersebut.

## Kesimpulan

Selain kesiapan pemuda, dibutuhkan juga sentuhan pemerintah dalam kaitannya dengan kebijakan-kebijakan strategis yang mampu menciptakan lingkungan yang kondusif dan mendukung pemuda untuk berkreasi dan berkontribusi bagi bangsa. Artinya, lanskap kebijakan publik Indonesia ke depan tidak bisa *business as usual*, namun harus mengedepankan pada sifat *update* yang cepat dan strategis.



## Daftar Pustaka

Bappenas, BPS, United Nations Population Fund, 2013. Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035. BPS.

BPS, 2012. Analisis Statistik Sosial: Bonus Demografi dan Pertumbuhan Ekonomi.

## Penulis

Monik Alamanda

Yoes C. Kenawas

## Tim Peneliti Survei Pandangan Kaum Muda Perkotaan

Indro Adinugroho, S.Psi., M.Si

Andina Dwifatma, S.I.Kom, M.Si

Edbert Gani Suryahudana, S.IP., M.Sc.

Salvatore Simarmata, S.Sos., M.A.